

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
(Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta)**

Nama: Nurrisyda Rosyufa

Dosen Pembimbing: Drs. Syamsudin, M.Pd

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan,
Bantul, D.I Yogyakarta, 555184.*

Email: risydasyufa@gmail.com

Syamhs@umy.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini mendeskripsikan strategi implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, waka kesiswaan, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian: 1) strategi implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dilakukan dengan cara: pemaknaan belajar tentang budaya, sekolah mengambil seni budaya karawitan sebagai mata pelajaran; pemaknaan belajar melalui budaya, sekolah mengambil kesenian karawitan, pedalangan, tari, dan bergodho untuk dijadikan sebagai ekstrakurikuler; dan pemaknaan belajar dengan budaya, sekolah mengintegrasikan pendidikan karakter yang bersifat pembiasaan ke dalam proses pendidikan. 2) Faktor pendukung: adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat; sarana prasarana yang memadai; pendidik yang mumpuni; adanya dukungan moral berupa fee; pandangan positif dari masyarakat; dapat membentuk karakter peserta didik. 3) Faktor penghambat: internal, kendala pada peserta didik, pendidik, sekolah; eksternal, dari lingkungan masyarakat, orang tua, serta Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Strategi, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Berbasis Budaya

Abstract

The purpose of this research is to describe the regional policy implementation strategy of the Special Region of Yogyakarta (DIY) regarding the management and implementation of cultural-based education in SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta and to find out its supporting and inhibiting factors. This research was qualitative with subjects involving the School Principal, the Vice Principal of Student Affairs, the teachers, and the students. The data collection techniques used were through interview, observation and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data display and data verification. The validity technique used was triangulation of sources and method.

The research result: 1) the regional policy implementation strategy of the Special Region of Yogyakarta (DIY) regarding the management and implementation of cultural-based education in SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta is conducted by: performing study interpretation towards culture, choosing karawitan cultural art as one of the lesson subjects, performing study interpretation through culture, choosing karawitan, puppetry, traditional dance, and bergodho as the school extracurricular program, and performing study interpretation with culture. The school has basically integrated character education which was initially in the form of a habitual manner into the form of educational process. 2) The supporting factors are: financial support from the Central Government, adequate facilities and infrastructures, competent teachers, fee as moral support, positive point of view from the society, the ability to enhance the students' character building. 3) The internal inhibiting factors are: constraints from the students, teachers and school, the external inhibiting factors are: surrounding society, parents, and Central Government.

Key Words: *Strategy, Policy Implementation, Cultural-Based Education*

PENDAHULUAN

Dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya yang telah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 2011 dan ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono X. Peraturan Daerah tersebut telah dirumuskan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat menjadi manusia yang cerdas dan berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya (Perda DIY No 5 Tahun 2011).

Peraturan Daerah DIY No 5 Tahun 2011 ini berisikan tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya khususnya di DIY. Peraturan Daerah ini juga merupakan salah satu bentuk usaha Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan cita-cita dan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan budaya dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kemudian masih di bawah kewenangannya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perda DIY Nomor 05 Tahun 2011 dengan merumuskan kebijakan yang lebih rinci berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2013 dan ditandatangani oleh

Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Peraturan Gubernur ini merupakan kebijakan yang berisi tentang arahan dalam menyusun Standar Isi, Pedoman Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Pendidikan Berbasis Budaya pada setiap jalur atau jenjang atau satuan pendidikan di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai kota pelajar, kota pariwisata, serta kota seni dan budaya. Salah satu yang mengidentifikasikan DIY dijuluki kota pelajar ialah karena banyaknya perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat banyak mahasiswa yang mengambil studi berasal dari berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru Negara Indonesia. Julukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar tak lepas juga dari adanya sejarah perkembangan pendidikan nasional. Sebagaimana yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang dikutip dalam Kumalasari (2010: 44) yakni '*Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*', menjadi prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih diterapkan secara nasional perlu untuk terus dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian.

Di dalam dunia pendidikan, pemahaman atas falsafah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal DIY, seperti *Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, sengguh ora mingkuh* juga perlu diterapkan. Pemahaman falsafah ini merupakan salah satu bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan karakter manusia berbudaya yang mampu mengembangkan dan menjaga kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap lestari di masa sekarang dan di masa depan (Kusdarini, 2016: 29). Selain itu juga diharapkan mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia bahkan di dunia. Hal ini sangat diperlukan mengingat DIY merupakan pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata yang bertaraf Internasional yang mampu menjadi candradimuka bagi semua warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan tercipta manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk keutamaan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama.

Adanya ketidakserasian antara perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter yang terjadi di masa sekarang ini juga telah memperkuat keinginan Provinsi DIY untuk menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan yang berbasis budaya, yaitu budaya lokal dan budaya pluralistik yang ada dan tumbuh di DIY. Apabila keinginan ini terwujud, DIY tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah, akan tetapi juga akan menjadi acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia yang mendunia.

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjadikan nilai-nilai budaya sebagai acuan yang diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam melandasi dan mendasari pendidikan di DIY.

Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis budaya ini, pendidikan perlu diarahkan untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas, cerdas secara spritual, sosial, dan intelektual yang mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas generasi muda tersebut dapat diwujudkan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas serta memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dilaksanakan di seluruh jenjang maupun jenis pendidikan, yaitu pada pendidikan formal terdapat; Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan pada pendidikan non formal meliputi Paud Nonformal, Kelompok Bermain, serta pada pendidikan informal adalah melalui pendidikan di dalam Keluarga (Marfuah, 2016: 646). SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sebagai salah satu jenjang tingkat satuan pendidikan formal yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari sasaran implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya tersebut. Sekolah berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah dengan segala aspek yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam pembentukan kurikulum dan pelaksanaannya harus mengangkat dan menjunjung nilai-nilai budaya luhur yang ada.

Namun pada kenyataannya, pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini masih belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa program sekolah yang mana dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Seperti salah satu contoh pada program sekolah unggulan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yaitu program pedalangan dan karawitan. Pada program ini masih ditemukan kendala pada sarana dan prasarannya. Padatnya jadwal pembelajaran formal di sekolah dan juga ruang yang kurang luas mengakibatkan proses pembelajaran pedalangan dan karawitan ini tidak dapat mencangkup banyak siswa dan siswinya. Akibatnya jadwal pembelajaran pedalangan dan karawitan hanya dapat berlangsung sebentar saja dan terpaksa menggunakan sistem bergantian karena alat yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan sedikitnya ketenagaan pendidik khususnya di bidang seni pedalangan dan karawitan membuat output dari program

ini belum maksimal. Selain itu belum ada laporan hasil pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang dilakukan sehingga belum tampak sejauh mana keberhasilan strategi implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sehingga nantinya dapat diketahui lebih jelas dan pasti terkait dengan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya ini, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif naturalistik yaitu suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu kondisi alamiah (*natural setting*) secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai objek yang diteliti secara natural sesuai yang terjadi di lapangan. (Ghoni & Almanshur, 2016: 28). Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara mendetail dan rinci mengenai bagaimana dan strategi apa saja, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, hasil pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dari dokumen pribadi, dokumen resmi, serta gambar atau foto hasil penelitian. Setelah menelaah, langkah selanjutnya ialah reduksi data yaitu dengan cara membuat rangkuman atau abstraksi, kemudian penyusunan satuan, lalu kategorisasi dan yang paling akhir adalah melakukan verifikasi data yaitu dengan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

Sebagai salah satu sekolah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah semestinya mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat juga dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2013 maka sudah jelas kebijakan tersebut perlu dipelajari dan dipahami oleh pihak sekolah untuk kemudian dijadikan landasan atau acuan dalam menyusun segala halnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pada pengimplementasian kebijakan pendidikan berbasis budaya ini, sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur kurikulum sekolahnya sendiri dalam rangka untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk mencapai proses belajar mengajar yang berbasis budaya, sekolah dapat memasukkan nilai-nilai budaya luhur dalam menyusun Standar Isi, Pedoman Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Pendidikan Berbasis budaya. Selain itu sekolah juga memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri kebijakan terkait dengan praksis pendidikan yang akan dilakukan pada waktu ke depan seperti contoh kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya nonakademik.

Pada dasarnya pembelajaran berbasis budaya ini dibedakan menjadi tiga makna. Yang pertama, belajar tentang budaya (menempatkan budaya sebagai bidang ilmu). Yang kedua, belajar dengan budaya (metode pemanfaatan budaya). Dan yang ketiga, belajar melalui budaya (pemahaman makna yang diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya). Setelah peneliti melakukan penelitian di sekolah dengan cara observasi, dokumentasi, serta wawancara, peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait dengan strategi yang telah dilakukan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dalam mencapai pengimplementasian pendidikan berbasis budaya.

Pada hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 18 November 2019 dengan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, beliau memaparkan bahwa sekolah telah mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengimplementasiannya SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta memiliki strategi tersendiri dalam melaksanakan kebijakan pendidikan berbasis budaya. Untuk mencapai pemaknaan belajar tentang budaya (menempatkan budaya sebagai bidang ilmu), sekolah telah mengambil seni budaya karawitan sebagai mata pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum. Sehingga pada proses

belajar mengajar, seni budaya karawitan ini menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta didik.

Kemudian untuk pemaknaan belajar melalui budaya (pemahaman makna yang diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya), sekolah menggunakan potensi dan sarana prasarana yang ada seperti gamelan dan wayang telah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan dan pedalangan. Kemudian ada juga ekstra tari serta *bergodho* atau biasa disebut keprajuritan dengan memasukkan ke dalam bentuk pembinaan kesiswaan, misalnya HW kemudian ada juga IPM yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dimana dalam pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini sekolah melestarikan dan mempertahankan budaya Jawa dengan tetap menjunjung tinggi nilai keislaman melalui pengkostuman pada semua bentuk kesenian yang bernuansa islami.

Kemudian untuk pemaknaan belajar dengan budaya atau (metode pemanfaatan budaya) di sini kepala sekolah telah menjelaskan bahwa budaya dikaji sedemikian rupa agar dapat terintegrasi di dalam proses pendidikan. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya-budaya keseharian yang bersifat pembiasaan atau biasa disebut pendidikan karakter yang mana semua itu tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist. Budaya yang dikaitkan dengan Al-Qur'an dan Hadist ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembentukan *akhlakul karimah* peserta didik.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat mendukung atau mendorong terjadinya sesuatu. Kaitannya dengan pengimplementasian pendidikan berbasis budaya, SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi dan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan berbasis budaya. Salah satu yang mendukung tercapainya pendidikan berbasis budaya ini adalah adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sekolah. Sehingga sekolah dapat memenuhi fasilitas-fasilitas untuk mencapai pendidikan berbasis budaya seperti ruang karawitan dan juga seperangkat alat gamelan yang sudah berkualitas tinggi. Potensi-potensi itulah yang dapat mendukung proses pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Untuk mencapai pendidikan berbasis budaya, sarana prasarana merupakan hal yang sangat penting. Karena pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini tidak akan tercapai secara optimal jika dalam prosesnya masih terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini, adalah semua hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan program sekolah sebagai langkah untuk mencapai pendidikan berbasis budaya. Jika ditinjau dari program karawitan yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, maka sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang karawitan dan seperangkat alat gamelan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 20 November 2019 bersama Ibu Titin selaku waka kesiswaan, beliau memaparkan bahwa sarana dan prasarana untuk memfasilitasi program karawitan sudah memadai, dan untuk program pedalangan sekolah juga sudah memiliki alat dan satu set wayang yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran pedalangan di sekolah. Walaupun satu set wayang itu didapatkan dari tangan kedua atau dapat dikatakan sudah barang bekas namun di sini Ibu Titin menyatakan bahwa kondisi wayang tersebut masih dalam keadaan bagus dan layak pakai.

Faktor pendukung pengimplementasian pendidikan berbasis budaya selanjutnya adalah pendidik yang sudah mumpuni. Di sini kepala sekolah menjelaskan bahwa faktor pendukung lainnya terdapat pada pendidik seni itu sendiri. Untuk pendidik seni budaya karawitan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah terbilang mumpuni. Pendidik merupakan alumni ISI pedalangan dan karawitan, selain itu ia juga merupakan salah satu personil grup wayang dalang Ki Seno (dalang terkenal di Pulau Jawa).

Selain itu faktor yang mendukung proses pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini adalah terletak pada adanya *fee* atau biaya yang terkadang didapatkan dari hasil pementasan atau perlombaan yang sekolah ikuti yang dapat menambahkan semangat peserta didik untuk terus mengikuti program sekolah yang mendukung pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Kemudian berbicara tentang faktor pendukung pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini, sekolah telah memiliki keyakinan bahwa program tersebut memang menghasilkan pandangan yang positif dari masyarakat. Hal inilah yang mendorong keinginan sekolah untuk terus mempertahankan program sekolah yang dapat mencapai pendidikan berbasis budaya. Selain itu program sekolah tersebut telah dapat membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Sehingga tidak salah jika sekolah terus

melaksanakan program pendidikan berbasis budaya ini untuk kebaikan sekolah dan semua warga sekolahnya.

3. Faktor Penghambat

Pada proses pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait kondisi sekolah seperti sarana dan prasarananya serta sumber daya manusianya. Berbicara tentang sumber daya manusia, telah kita ketahui bahwa manusia merupakan pelaku utama dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Kebijakan akan dapat dikatakan berhasil jika telah dipatuhi oleh pelakunya dan juga dapat menciptakan suatu kondisi yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Namun disini kita juga perlu memahami bahwa individu satu dengan lainnya itu berbeda. Sama halnya dengan siswa-siswi maupun guru dan TU di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda sesuai latar belakang dan pengalaman masing-masing individu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kepala sekolah menjelaskan bahwa kendala yang paling sulit dalam pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di sini adalah terletak pada sumber daya manusianya. Untuk membentuk suatu budaya yang baik di lingkungan sekolah itu tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Kepala sekolah menyadari bahwa siswa-siswinya masih banyak ditemukan yang melanggar peraturan sekolah. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kepribadian yang dapat dikatakan menyimpang.

Faktor penghambat yang lainnya yaitu terjadi suatu kondisi yang bertolak belakang antara lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Bebasnya lingkungan di masyarakat, tidak sejalan dengan lingkungan sekolah yang menuntut siswa-siswinya untuk berperilaku baik seutuhnya. Artinya di sini perilaku seorang siswa dapat dikatakan tidak bisa lagi dibedakan antara ketika ia di masyarakat ataupun di sekolah. Di lingkungan masyarakat seorang siswa dapat bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan seperti contoh merokok. Oleh karena itu, sekuat apapun peraturan sekolah yang dibuat, telah menutup kemungkinan dapat merubah kebiasaan siswa yang menyimpang, karena di dalam kehidupannya di lingkungan masyarakat mereka tidak ada peraturan yang

sama seperti di sekolah. Sehingga mereka menganggap bahwa peraturan sekolah adalah hal biasa yang hanya disebut sebagai formalitas saja.

Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah saat ini, jika ditinjau lebih dalam lagi merupakan suatu hal yang kompleks. Dengan latar belakang siswa dan siswinya yang sangat beragam memberikan tantangan tersendiri bagi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya. Salah satu yang menjadi keprihatinan sekolah adalah bentuk perilaku anak didik yang sekarang ini menjadikan perilaku negatif menjadi suatu hal yang wajar dan terbiasa. Sebagai contoh perilaku tawuran. Perilaku tawuran atau biasa disebut *gelut* dianggap hal biasa dan wajar dilakukan ketika seseorang atau sekelompok siswa ingin melampiaskan egonya. Sehingga perilaku tawuran sudah menjadi budaya di lingkungan pelajar.

Kemudian faktor penghambat pengimplementasian pendidikan berbasis budaya juga terletak pada pola pikir dari peserta didik yang masih rendah dalam menentukan masa depannya. Siswa yang sudah duduk di bangku sekolah kelas tiga menengah atas belum bisa menentukan dimana dia akan kuliah, fakultas apa, jurusan apa yang nantinya akan ia arungi. Mereka belum dapat mendefinisikan kehidupan dua tahun kedepan, tiga tahun kedepan atau bahkan enam tahun kedepan. Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar hanya dianggap sebatas mengalir saja dalam kehidupannya, tidak ada target yang ingin dicapai dan tidak ada juga keinginan yang kuat untuk mencari ilmu sebagai bekal masa depan. Ditambah lagi dengan pola asuh orang tua yang terbilang *luweh* atau tidak mau tahu mengakibatkan kesenjangan perilaku peserta didik terjadi dimana-mana. Bahkan di sekolah yang unggul pun hal tersebut masih banyak ditemukan.

Orang tua merupakan faktor terpenting dalam membentuk karakter seorang anak. Mengingat keluarga adalah pendidikan pertama bagi seorang anak, sudah seharusnya orang tua memberikan suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Disini peran orang tua adalah mendidik, mengasuh serta memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam hal apapun terhadap anaknya. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kesenjangan pola asuh orang tua di kalangan masyarakat.

Kepala sekolah juga menyebutkan bahwa selain adanya kesenjangan pola asuh orang tua dalam memberikan contoh perilaku terhadap anak, ada juga kesalahan orang tua yang mana karena atas dasar alasan kasihan ataupun memberikan kasih sayang, menganggap bahwa itu hal yang sah-sah saja dilakukan. Salah satu contohnya adalah

orang tua yang menunggu anaknya sekolah sampai jam belajar-mengajar selesai. Padahal jika ditinjau lebih dalam, dengan adanya anak yang ditunggu ketika berada di sekolah hingga jam belajar mengajar usai merupakan tindakan yang malah justru dapat menghambat perkembangan kedewasaan anak. Yang seharusnya anak dapat berkembang dan membentuk kepercayaan dirinya sendiri terhadap lingkungan sekolah, malah justru terhambat oleh adanya orang tua yang menunggunya.

Selain itu dari pemaparan kepala sekolah, beliau juga mengatakan bahwa pemahaman orang tua disini dalam mendidik anak masih kurang. Sebagai contoh pada saat memasukkan anaknya ke sebuah jenjang pendidikan, orang tua menganggap bahwa anak yang dimasukkan ke sekolah lebih cepat akan lebih baik. Padahal pada faktanya hal itu malah dapat mengakibatkan kesenjangan kedewasaan. Dimana anak yang harusnya masih bisa bermain malah harus sudah mengikuti pembelajaran yang kompleks dan bersifat formal di dalam kelas. Akibatnya di kelas mereka yang seharusnya mengikuti pembelajaran dengan tertib malah asik bermain sendiri karena memang jiwa bermainnya yang masih kuat.

Ditambah lagi dengan peran orang tua yang berlebihan pada salah satu program sekolah. Program sekolah yang dimaksud disini adalah kegiatan perkemahan. Pada dasarnya sekolah melakukan program tersebut bertujuan untuk mendidik kemandirian siswa. Namun pada pelaksanaannya, orang tua malah menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Masih banyak ditemukan orang tua yang bukan membiarkan anaknya hidup di alam terbuka dan mempercayakan anaknya pada pihak sekolah, malah berbondong-bondong untuk menjenguk anaknya di lokasi perkemahan. Hal itu sebenarnya merupakan tindakan orang tua yang salah, namun dewasa ini hal itu malah justru menjadi sebuah budaya.

Faktor penghambat pengimplementasian pendidikan berbasis budaya yang lain yang peneliti dapatkan adalah kendala pada sekolah itu sendiri. Adanya tuntutan kurikulum yang mengedepankan masalah administrasi, membuat sekolah menjadi terbebani khususnya guru. Mereka harus bersusah payah dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah sehingga mengakibatkan lemahnya perhatian guru pada siswa. Padahal jika dikaji lebih dalam, cita-cita pendidikan sendiri itu tidak hanya menciptakan generasi yang memiliki kecerdasan secara akademik saja, bahkan malah

yang terpenting itu kecerdasan non akademik, dimana pendidikan dapat menciptakan individu yang berbudaya yang baik.

Selain itu, dari hasil wawancara yang telah berlangsung, kepala sekolah juga mengungkapkan keresahannya dalam pengimplementasian pendidikan berbasis budaya. Keresahan itu timbul ketika guru dituntut untuk tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan akademik saja namun tetap harus memperhatikan pendidikan karakter, namun di sisi lain tuntutan prestasi akademik juga tinggi. Sehingga terkadang guru melupakan kewajibannya sebagai pendidik yang perlu mengajarkan pendidikan karakter untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik saja, tetapi juga menjadi peserta didik yang berbudaya dan berkarakter baik.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa adanya keresahan guru yang masih dirasakan saat ini, yaitu ketika guru mengajar di dalam kelas ketika jam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kuatnya hukum pidana yang berlaku saat ini, mengakibatkan guru menjadi tidak berani dalam mendidik siswa untuk membentuk karakter siswa dengan cara melakukan tindakan yang cenderung berupa kekerasan fisik, sehingga pada pelaksanaannya guru hanya mengajarkan pendidikan bidang akademik saja. Padahal sebenarnya tindakan tersebut jika masih berada di batas sewajarnya sebenarnya merupakan satu tindakan guru yang dapat mendidik anak didiknya dalam membentuk karakter yang baik.

Di samping itu, kepala sekolah juga mengatakan bahwa kelemahan guru dalam menyampaikan pembelajaran juga masih ditemukan. Lemahnya kualifikasi pendidik jaman dulu dan kurangnya kreativitas dan keinovatifan seorang pendidik mengakibatkan cara penyampaian yang pendidik lakukan tidak menarik. Berbicara tentang pendidik atau guru, pada hasil wawancara yang peneliti lakukan, masih juga terdapat kelemahan pada guru. Guru masih cenderung tidak melaksanakan pendidikan berbasis budaya. Pada dasarnya di setiap mata pelajaran yang diajarkan, guru memiliki kewajiban untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan berbasis budaya ke dalam RPP yang mereka susun sebelumnya. Namun di sini masih banyak ditemukan guru yang tidak melakukan hal itu. Padahal sudah jelas bahwa kebijakan yang telah berlaku menuntut nilai-nilai pendidikan berbasis budaya itu harus terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran.

Beralih dari permasalahan kelemahan stakeholder dalam pengimplementasian pendidikan berbasis budaya, terdapat kendala atau faktor penghambat pula yang

disebabkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam wawancara yang telah berlangsung, kepala sekolah telah mengungkapkan bahwa masih adanya kelemahan yang ada pada Pemerintah Daerah, yaitu kurangnya sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Di sini kepala sekolah juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah secara tersirat dari pemaparannya, bahwa Pemerintah Daerah yang tanpa melakukan sosialisasi kebijakan tiba-tiba melakukan supervisi pada sekolah. Hal inilah yang menjadi keresahan pihak sekolah dimana kaitannya dengan pemahaman terhadap kebijakan dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya masih rendah. Akibatnya pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini belum berjalan secara optimal.

Kemudian kaitannya dengan pengimplementasian pendidikan berbasis budaya yang menjurus ke program sekolah yang mengandung nilai budaya luhur Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti pedalangan, karawitan dan tari juga masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat proses pengimplementasian kebijakan daerah ini. Di antaranya ialah kendala yang terletak pada masih rendahnya minat peserta didik untuk mengikuti program sekolah tersebut. Rendahnya minat siswa ini menunjukkan bahwa keinginan sekolah untuk mencapai pendidikan berbasis budaya tidak sejalan dengan keadaan peserta didiknya. Akibatnya dalam proses pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini tidak sepenuhnya berjalan optimal.

Ditambah lagi sulitnya mendidik peserta didik untuk menguasai pembelajaran yang berbasis budaya juga menjadi kendala tersendiri bagi sekolah. Sebagai contoh pada program pedalangan, kepala sekolah menyadari bahwa mendidik seorang peserta didik untuk menguasai ilmu pedalangan itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan di tingkat sekolah menengah atas hanya ada waktu tiga tahun untuk mendidik. Sehingga pada saat peserta didik sudah dapat tampil dengan baik, bebarengan ketika sudah saatnya ia lulus. Dan untuk mendidik peserta didik yang selanjutnya harus dari nol lagi, ditambah lagi dengan rendahnya minat peserta didik, semua itu membuat proses pengimplementasian pendidikan berbasis budaya ini tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Selain rendahnya minat peserta didik pada program sekolah yang berbasis budaya, terdapat juga kendala yang ada pada sarana dan prasarana. Telah kita ketahui bahwa di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta seni budaya karawitan merupakan seni budaya yang dijadikan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Namun mengingat banyaknya jumlah peserta didik tidak sebanding dengan banyaknya alat musik gamelan

mengakibatkan proses pembelajaran seni budaya karawitan harus berlangsung dengan sistem bergantian. Dari situlah muncul kendala-kendala dimana pada saat pembelajaran karawitan berlangsung, siswa yang sedang tidak mendapatkan kesempatan untuk memegang alat gamelan menjadi tidak tertib dan bertindak semaunya seperti asik main sendiri bahkan ada yang pergi ke kantin.

Kemudian kendala yang lainnya adalah terdapat pada kurangnya waktu untuk siswa berlatih karawitan ketika sekolah akan menampilkan pentas karawitan. Mengingat sekolah telah melaksanakan program *full day*, dimana pembelajaran berakhir pada pukul empat sore, maka sekolah terpaksa harus mengambil sebagian jam kegiatan belajar mengajar peserta didik untuk mengadakan latihan mempersiapkan penampilan yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Strategi sekolah dalam mencapai pendidikan berbasis budaya dilakukan dengan 3 langkah, yaitu :
 - a. Untuk mencapai pemaknaan belajar tentang budaya (menempatkan budaya sebagai bidang ilmu), sekolah mengambil seni budaya karawitan sebagai mata pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum.
 - b. Untuk mencapai pemaknaan belajar melalui budaya (pemahaman makna yang diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya), sekolah mengambil kesenian karawitan, pedalangan, tari, dan bergodho untuk dijadikan sebagai ekstrakurikuler.
 - c. Untuk mencapai pemaknaan belajar dengan budaya (metode pemanfaatan budaya), sekolah mengintegrasikan pendidikan karakter yang bersifat pembiasaan ke dalam proses pendidikan.
2. Faktor pendukung pengimplementasian pendidikan berbasis budaya meliputi :
 - a. Adanya bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sekolah.
 - b. Sarana dan prasarana yang berkualitas.
 - c. Pendidik yang sudah mumpuni.
 - d. Adanya dukungan moral berupa *fee* yang dapat menumbuhkan semangat peserta didik dan juga guru serta *staff* sekolah untuk mempertahankan program pendidikan berbasis budaya.

- e. Pandangan positif dari masyarakat.
 - f. Manfaat dari program sekolah itu sendiri dalam mencapai pendidikan berbasis budaya yang dapat membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik.
3. Faktor penghambat pengimplementasian pendidikan berbasis budaya meliputi :
- a. Internal
 - 1) Peserta Didik
 - a) Kurangnya kesadaran diri yang mengakibatkan banyak siswa yang masih melanggar dan terbelang menyimpang.
 - b) Pola pikir peserta didik yang masih rendah dalam menentukan masa depan.
 - c) Rendahnya minat peserta didik untuk mengikuti program sekolah yang mengandung nilai budaya luhur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d) Tidak tertib dan bertindak semaunya
 - e) Peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda.
 - 2) Pendidik atau Guru
 - a) Adanya tuntutan kurikulum yang mengedepankan masalah administrasi, membuat sekolah menjadi terbebani khususnya guru, sehingga mengakibatkan lemahnya perhatian guru pada siswa.
 - b) Tuntutan prestasi akademik yang tinggi, mengakibatkan terkadang guru melupakan kewajibannya sebagai pendidik yang perlu mengajarkan pendidikan karakter.
 - c) Kuatnya hukum pidana yang berlaku saat ini, mengakibatkan guru menjadi tidak berani dalam mendidik siswa untuk membentuk karakter siswa dengan cara melakukan tindakan yang cenderung berupa kekerasan fisik, sehingga pada pelaksanaannya guru hanya mengajarkan pendidikan bidang akademik saja.
 - d) Lemahnya kualifikasi pendidik terdahulu dan kurangnya kreativitas dan keinovatifan seorang pendidik mengakibatkan cara penyampaian pendidik tidak menarik.
 - e) Guru masih cenderung tidak melaksanakan atau tidak memasukkan nilai-nilai pendidikan berbasis budaya ke dalam RPP.
 - f) Kendala pada masing-masing internal individu yang masih perlu dipaksa dan diberi instruksi terlebih dahulu dan juga kurangnya kekreativitasan individu.

- 3) Sekolah
 - a) Pemahaman terhadap kebijakan dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya masih rendah.
 - b) Membutuhkan waktu yang lama dan sulitnya mendidik peserta didik untuk menguasai pembelajaran berbasis budaya seperti contoh pada program pedalangan.
 - c) Mengingat banyaknya jumlah peserta didik tidak sebanding dengan banyaknya alat musik gamelan mengakibatkan proses pembelajaran seni budaya karawitan harus berlangsung dengan sistem bergantian.
 - d) Waktu untuk berlatih pada saat sekolah akan pentas atau tampil yang mengganggu jam kegiatan belajar mengajar siswa.
- b. Eksternal
 - 1) Terjadi suatu kondisi yang bertolak belakang antara lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.
 - 2) Adanya kesenjangan pola asuh orang tua dalam memberikan contoh perilaku terhadap anak yang menimbulkan kesenjangan kedewasaan.
 - 3) Pemahaman orang tua dalam mendidik anak masih kurang.
 - 4) Kurangnya sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
 - 5) Tidak adanya buku pedoman pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Saran

1. Sekolah
 - a. Masih banyaknya siswa yang melanggar peraturan sekolah, maka sekolah perlu memperketat dalam pengawasan terhadap peserta didik dan juga memperberat hukuman pada siswa yang melanggar.
 - b. Sekolah perlu memperhatikan kualitas guru agar proses pendidikan berbasis budaya dapat berjalan lebih optimal.
 - c. Sekolah perlu memenejemen kurikulum pendidikan berbasis budaya lebih baik lagi agar pelaksanaanya tidak lagi ada timbul permasalahan di internal maupun eksternal.
 - d. Sekolah perlu memperbaiki sarana dan prasarana lebih baik lagi, seperti contoh ruang karawitan yang perlu diperluas dan lebih dijaga kebersihannya.

- e. Untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah maka sekolah perlu mengadakan sosialisasi terkait dengan kebijakan daerah tentang pendidikan berbasis budaya.
2. Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah sudah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh ke setiap sekolah agar pengimplementasiannya dapat terealisasi dengan baik.
 - b. Pemerintah perlu memberikan buku pedoman pelaksanaan kebijakan di setiap sekolah agar sekolah dapat memahami kebijakan pendidikan berbasis budaya dengan mudah.
 3. Orang Tua
 - a. Orang tua sudah tidak semestinya jika hanya mengandalkan pendidikan di sekolah, karena mengingat pendidikan yang paling utama adalah pendidikan keluarga dimana orang tua sangat berperan penting di dalamnya.
 - b. Orang tua perlu memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak serta mengubah pola asuh terhadap anak supaya anak menjadi pribadi yang baik.
 4. Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait dengan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2013 agar didapat hasil penelitian yang lebih rinci dan mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoni, D., & Almanshur, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Kumalasari, D. (2010). Kosep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Religius). *Istoria*, 8(1).
- Kusdarini, E. (2016). Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21, 22-32.
- Marfuah, S. (2016). Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5, 743-752.
- Perda DIY No 5 Tahun 2011

Peraturan Gubernur DIY No 66 Tahun 2013

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : NURRISYIDA ROSYUFA
NIM : 20160720143
Prodi : Pendidikan Agama Islam/FAI
Judul : STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
Dosen Pembimbing : Drs. Syamsudin, M.Pd.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 12%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolahan

Yogyakarta, 1/28/2020
yang melaksanakan pengecekan



EaelaNiswatin, S.I.Pust



Ikram Al- Zein, S.Kom.I



Scanned with
CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syamsudin, M. Pd.
NIK : 19630710199302115018

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

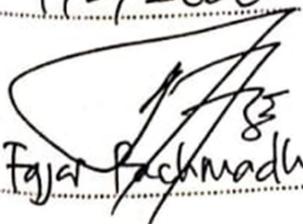
Nama : Nurriyada Rosyafa
NPM : 20160920143
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Naskah Ringkas : Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

Hasil Tes Turnitin* : 12 %

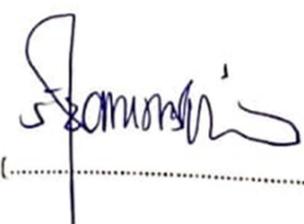
Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

4/2/2020

(Fajar Fachmadhani)

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Syamsudin)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.